



Journal of Human And Education

Volume 5, No. 1, Tahun 2025, pp 491-506

E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876

Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

Peran Sosialisasi Pengelolaan Dana Dalam Meningkatkan Realisasi Anggaran

Jinan Abdul Kadir Bajamal^{1*}, Darman², Mohammad Nofal³, Cici Rianty K. Bidin⁴

Universitas Tadulako

Email: jinanabdulkadir06@gmail.com^{1*}

Abstrak

Pengelolaan dana yang efektif merupakan kunci keberhasilan pembangunan di tingkat kelurahan. Sosialisasi memegang peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran sosialisasi pengelolaan dana dalam meningkatkan realisasi anggaran di Kantor Kelurahan Nunu. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam proses sosialisasi yang dilakukan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi yang terencana dan terstruktur dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran, sehingga realisasi anggaran dapat ditingkatkan.

Kata Kunci: *Sosialisasi, Pengelolaan Dana, Realisasi Anggaran, Partisipasi Masyarakat, Kelurahan*

Abstract

Effective fund management is key to successful development at the village level. Socialization plays an important role in increasing public understanding and participation in the management of these funds. This study aims to examine the role of fund management socialization in increasing budget realization at the Nunu Village Office. A descriptive qualitative approach is used to deeply understand the socialization process carried out, as well as to identify factors that influence its effectiveness. The results showed that planned and structured socialization can increase public understanding and participation in budget management, thereby increasing budget realization.

Keywords: *Socialization, Fund Management, Budget Realization, Community Participation, Village*

PENDAHULUAN

Setiap organisasi baik sektor publik maupun swasta memerlukan sistem pengendalian manajemen yang menjamin tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Salah satu elemen penting dalam sistem pengendalian manajemen adalah anggaran. Anggaran merupakan alat bantu manajemen dalam mengalokasikan keterbatasan sumber daya dan sumber dana yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan. Anggaran tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan keuangan, tetapi juga sebagai alat pengendalian dan pengawasan

terhadap penggunaan dana publik (Suparman et al., 2024). Kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan memiliki peran krusial dalam menyalurkan dana pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut (Fitriasari, 2021) Sosialisasi merupakan salah satu upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang maksud dan tujuan yang kita sampaikan. Sosialisasi, sebagai sebuah proses komunikasi yang terencana dan terarah, memegang peranan kunci dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan terkait pengelolaan anggaran di tingkat kelurahan. Pengetahuan, keterampilan dan kreativitas penduduk desa dianggap sebagai faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya pengelolaan sumber daya yang tersedia."(Risnawati *et al.*, 2022). Modal intelektual untuk kinerja yang lebih baik (Ferdinand & Wahyuningsih, 2018) Melalui penyuluhan, pelatihan, dan berbagai media komunikasi, sosialisasi dapat menjelaskan secara rinci tentang sumber-sumber anggaran, prosedur penganggaran, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, sosialisasi juga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran. Masyarakat dapat dilibatkan dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan, pemantauan penggunaan anggaran, serta evaluasi hasil kegiatan. Dengan demikian, masyarakat dapat memastikan bahwa anggaran kelurahan digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Sosialisasi yang efektif diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap realisasi anggaran di Kantor Kelurahan Nunu. Peningkatan pemahaman perangkat kelurahan dan masyarakat terhadap mekanisme anggaran akan mempercepat proses pengambilan keputusan terkait anggaran, sehingga proses pencairan dan penggunaan anggaran dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat waktu. Partisipasi masyarakat sulit dilaksanakan karena beberapa faktor, antara lain kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peran tersebut, perbedaan pendapat dan kepentingan, kurangnya pendanaan, dan kurangnya dukungan pemerintah (Riyanto & Kovalenko, 2023)

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran dapat diatasi dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran mereka dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu caranya adalah dengan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Alokasi anggaran pada badan pengelolaan dan aset daerah dalam tingkat sasaran strategis pengelolaan keuangan dan aset daerah tertib dan akuntabel (Manoppo et al., 2019). Alokasi anggaran tersebut harus direncanakan dengan matang dan terstruktur agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Menurut Iqbal et al (2021) rencana kegiatan organisasi yang disusun secara sistematis untuk satu periode tertentu yang didalam-Nya terdapat susunan alokasi dana dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut.

Rencana kegiatan dan alokasi dana tersebut hendaknya disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas masyarakat, serta diselaraskan dengan tujuan pembangunan daerah. Kantor Kelurahan Nunu, sebagai salah satu unit pemerintahan di tingkat kelurahan, tidak luput dari permasalahan tersebut. Realisasi anggaran yang belum optimal dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan dan berdampak pada kualitas pelayanan publik. Sektor publik atau organisasi mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan layanan public (Daswati et al., 2021).

Data Anggaran Dan Realisasi Kelurahan Nunu Tahun 2020-2023

Tahun	Anggaran (RP)	Anggaran Dana Alokasi Umum (RP)	Total	Realisasi (RP)	Persen
2020	125,000,000.00	366,000,000.00	491,000,000.00	481,000,000.00	97.96%
2021	120,000,000.00	366,000,000.00	486,000,000.00	476,000,000.00	97.94%

2022	125,000,000.00	266,000,000.00	391,000,000.00	381,000,000.00	97.44%
2023	125,000,000.00	266,000,000.00	391,000,000.00	381,000,000.00	97.44%

Sumber: Data Anggaran Kelurahan Nunu

Data diatas menunjukkan bahwa terjadi penurunan realisasi anggaran Kelurahan Nunu selama 4 Tahun terakhir oleh karena itu perlu dapat menunjukkan realisasi anggaran dalam rangka menyelesaikan program-program kelurahan. Pada tahun 2020, Kelurahan Nunu memiliki total anggaran sebesar Rp. 491.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 481.000.000,00 atau 97,96%. Pada tahun 2022 dan 2023, anggaran mengalami penurunan yang lebih signifikan menjadi Rp. 391.000.000,00 setiap tahunnya. Meskipun demikian, realisasi anggaran tetap tinggi dengan Rp. 381.000.000,00 atau 97,44% pada kedua tahun tersebut. Penurunan jumlah dana yang direalisasikan menunjukkan adanya peluang untuk pengoptimalan. Salah satu strategi untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dan menjamin keberlangsungan program-program kelurahan adalah dengan mendorong Partisipasi aktif masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami secara mendalam Peran sosialisasi pengelolaan dana yang diterapkan dalam meningkatkan realisasi anggaran di Kantor Kelurahan Nunu. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan untuk menggali dan mendeskripsikan secara rinci kondisi dan dinamika sosial yang terjadi dalam proses sosialisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi strategi tersebut. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, seperti lurah, staf kelurahan, tokoh masyarakat, dan warga, serta observasi langsung terhadap kegiatan sosialisasi yang dilakukan. Analisis data akan dilakukan secara induktif, dengan mengidentifikasi tema-tema kunci yang muncul dari data dan menghubungkannya dengan teori-teori yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan dana kelurahan dapat dideskripsikan dan dianalisis berdasarkan lima karakteristik yang yaitu (1) Perencanaan alokasi dana (2) Pelaksanaan alokasi dana (3) Pertanggung Jawaban Alokasi Dana

(1) Perencanaan Alokasi Dana

Alokasi dana kelurahan adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Oleh karena itu program perencanaan dan kegiatan disusun melalui musyawarah. Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan (Mashuri et al., 2020).

(2) Pelaksanaan Alokasi Dana

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari alokasi dana sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan. Dalam pelaksanaan alokasi dana kelurahan dibutuhkan keterbukaan dari tim pelaksana kepada seluruh masyarakat. Keterbukaan informasi ini merupakan usahan pemerintah untuk melaksanakan transparansi dalam peneglolaan dana dari sisi prinsip akutanbilitas pelaksanaan alokasi dana (Nurhayati & Saleh Ridwan, 2019).

(3) Pertanggung Jawaban Alokasi Dana

Pertanggung jawaban alokasi dana kelurahan adalah tanggung jawab seluruh aparatur

pemerintah kelurahan termasuk lurah. Pertanggung jawaban ini dilakukan untuk memastikan bahwa dana kelurahan digunakan sesuai dengan ketentuan dan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Dan jika dana alokasi kelurahan masih tersisah akan dikembalikan ke kantor kecamatan

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi peningkatan realisasi anggaran di Kelurahan Nunu melibatkan serangkaian tahapan yang sistematis dan terstruktur. Tahapan-tahapan ini dimulai dari (1) koordinasi awal dengan operator kelurahan, (2) penyusunan jadwal kegiatan (3) pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara (4) penyusunan laporan akhir. Setiap tahapan memiliki tujuan dan kontribusi spesifik dalam mencapai tujuan peningkatan realisasi anggaran



Sumber: Hasil Survey Lapangan 2024

Gambar 1. Koordinasi dengan Operator Kelurahan

Gambar 1 menunjukkan kegiatan koordinasi antara tim pelaksana kegiatan sosialisasi dengan operator Kelurahan Nunu, Ibu Nardiana, pada minggu terakhir bulan Februari, di awal dimulainya kegiatan. Koordinasi ini merupakan bersama awal yang penting dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi peningkatan realisasi anggaran di Kelurahan Nunu. Koordinasi awal ini bertujuan untuk membangun pemahaman 4ersama antara tim pelaksana dan pihak kelurahan mengenai tujuan, ruang lingkup, dan rencana pelaksanaan kegiatan sosialisasi.



Sumber: Hasil Survey Lapangan 2024

Gambar 2 Proses Penyusunan *Time Schedule*

Gambar 2 menunjukkan penulis bersama tim sedang menyusun *time schedule* kegiatan pada minggu pertama bulan Maret. *Time schedule* ini merupakan perencanaan terperinci mengenai jadwal pelaksanaan setiap tahapan kegiatan sosialisasi. Penyusunan *time schedule* kegiatan pada tahap awal ini sangat penting untuk memastikan kelancaran dan efektivitas pelaksanaan sosialisasi. *Time schedule* yang terperinci mencakup jadwal pelaksanaan setiap kegiatan, mulai dari koordinasi awal, pengumpulan data, pengolahan data, hingga penyusunan

laporan akhir. Dengan adanya *time schedule*, tim pelaksana dapat mengatur waktu dan sumber daya secara efisien, serta mengantisipasi potensi kendala yang mungkin terjadi.



Sumber: Hasil Survey Lapangan 2024

Gambar 3 Proses Pendataan RT di Kelurahan

Gambar 3 menunjukkan kegiatan penulis dan tim saat melakukan turun lapangan pada minggu kedua bulan Maret untuk mendata setiap ketua RT di Kelurahan Nunu. Dalam kegiatan ini, tim melakukan wawancara dan mengisi kuisisioner mini bersama ketua RT. Turun lapangan untuk mendata ketua RT merupakan langkah penting dalam pengumpulan data awal untuk kegiatan sosialisasi. Ketua RT memiliki peran strategis sebagai perwakilan masyarakat di tingkat terkecil, sehingga pemahaman dan partisipasi mereka dalam pengelolaan anggaran sangat penting.

Kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi tingkat pemahaman ketua RT terhadap mekanisme anggaran kelurahan. Hal ini penting untuk mengetahui sejauh mana ketua RT memahami proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran, serta hak dan kewajiban mereka dalam pengelolaan anggaran.
2. Mengukur tingkat partisipasi ketua RT dalam pengelolaan anggaran kelurahan. Partisipasi ketua RT dapat dilihat dari keterlibatan mereka dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), forum konsultasi publik, atau kegiatan pengawasan lainnya.
3. Mengumpulkan aspirasi, kebutuhan, dan usulan dari ketua RT terkait penggunaan anggaran kelurahan. Ketua RT dapat menyampaikan usulan program dan kegiatan yang dianggap prioritas oleh masyarakat, serta memberikan masukan terhadap rencana anggaran yang telah disusun.



Sumber: Hasil Survey Lapangan 2024

Gambar 4. Pendataan di Sekolah

Gambar 4 menunjukkan kegiatan penulis dan tim ketika melakukan pendataan di setiap sekolah yang ada di Kelurahan Nunu pada minggu kedua sampai minggu ketiga bulan Maret. Pada gambar ini, terlihat penulis dan tim sedang melakukan pendataan di salah satu sekolah

di Kelurahan Nunu. Pendataan di sekolah-sekolah merupakan bagian penting dari upaya pengumpulan data untuk kegiatan sosialisasi peningkatan realisasi anggaran. Sekolah-sekolah memiliki peran penting dalam pembangunan sumber daya manusia di Kelurahan Nunu, sehingga pemahaman dan partisipasi mereka dalam pengelolaan anggaran sangat penting.

Kegiatan pendataan di sekolah-sekolah bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi tingkat pemahaman pihak sekolah terhadap mekanisme anggaran kelurahan. Hal ini penting untuk mengetahui sejauh mana pihak sekolah memahami proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran, serta hak dan kewajiban mereka dalam pengelolaan anggaran yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Mengukur tingkat partisipasi sekolah dalam pengelolaan anggaran kelurahan. Partisipasi sekolah dapat dilihat dari keterlibatan mereka dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), forum konsultasi publik, atau kegiatan pengawasan lainnya yang berkaitan dengan pendidikan.
3. Mengumpulkan aspirasi, kebutuhan, dan usulan dari pihak sekolah terkait penggunaan anggaran kelurahan di bidang pendidikan. Pihak sekolah dapat menyampaikan usulan program dan kegiatan yang dianggap prioritas untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kelurahan Nunu, serta memberikan masukan terhadap rencana anggaran yang telah disusun.



Sumber: Hasil Survey Lapangan 2024

Gambar 5 Proses Peninjauan Kembali Data yang Telah Terkumpul

Gambar 5 menunjukkan bahwa kegiatan pendataan ini merupakan kelanjutan dari upaya pengumpulan data yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu pendataan ketua RT dan sekolah-sekolah. Pendataan pada minggu keempat bulan Maret ini bertujuan untuk melengkapi data yang masih kurang atau menggali informasi lebih lanjut dari responden yang belum sempat ditemui pada kegiatan sebelumnya. Data yang dikumpulkan pada tahap ini dapat berupa informasi mengenai tingkat pemahaman masyarakat terhadap anggaran kelurahan, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran, serta aspirasi dan kebutuhan masyarakat terkait penggunaan anggaran. Data ini akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun strategi sosialisasi yang lebih komprehensif dan tepat sasaran.



Sumber: Hasil Survey Lapangan 2024

Gambar 6 Proses Penginputan Data

Gambar 6 menunjukkan kegiatan penulis dan tim pada minggu pertama hingga minggu kedua bulan April, di mana mereka masih melakukan input data ke kuisisioner besar dan mengklarifikasi beberapa pertanyaan kuisisioner mini yang belum terisi dengan Ibu Lurah Kelurahan Nunu. Tahap ini merupakan kelanjutan dari proses pengumpulan data yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah data dari ketua RT, sekolah-sekolah, dan masyarakat umum terkumpul, tim melanjutkan dengan menginput data tersebut ke dalam kuisisioner besar. Kuisisioner besar ini dirancang untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap dan mendalam mengenai pemahaman, partisipasi, dan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan anggaran kelurahan.

Selain menginput data, tim juga melakukan klarifikasi terhadap beberapa pertanyaan kuisisioner mini yang belum terisi dengan Ibu Lurah. Hal ini dilakukan untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan data yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan strategi sosialisasi. Klarifikasi dengan Ibu Lurah juga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi dan kebutuhan Kelurahan Nunu terkait pengelolaan anggaran.



Sumber: Hasil Survey Lapangan 2024

Gambar 7 Kunjungan di Kantor BPS Kota Palu

Gambar 7 menunjukkan kegiatan penulis dan tim melakukan kunjungan ke kantor BPS Kota Palu untuk bertemu mentor pada minggu ketiga bulan April. Kunjungan ke kantor BPS Kota Palu untuk bertemu mentor merupakan langkah penting dalam proses pelaksanaan kegiatan sosialisasi. BPS sebagai lembaga resmi yang bertanggung jawab dalam pengumpulan dan pengolahan data statistik memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dalam bidang ini.

Kunjungan ini bertujuan untuk:

1. Mendapatkan arahan dan bimbingan teknis dari mentor terkait analisis data dan strategi sosialisasi. Mentor dari BPS dapat memberikan masukan berharga mengenai metode analisis data yang sesuai, interpretasi hasil analisis, serta strategi sosialisasi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran.
2. Memperoleh umpan balik (feedback) dari mentor mengenai pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Mentor dapat memberikan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan, serta memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan sosialisasi.
3. Membangun jaringan kerja sama dengan BPS Kota Palu. Kerja sama dengan BPS dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi Kelurahan Nunu dalam hal pengembangan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas data, serta akses terhadap informasi dan teknologi yang relevan.



Sumber: Hasil Survey Lapangan 2024

Gambar 8 Pengumpulan Data Blok Kesehatan

Gambar 8 menunjukkan kegiatan penulis dan tim pada minggu keempat bulan April, di mana mereka mengantarkan surat izin untuk meminta data "Blok Kesehatan" ke Puskesmas Sangurara, Kecamatan Tatanga. Pengumpulan data "Blok Kesehatan" dari Puskesmas Sangurara merupakan langkah penting dalam upaya memperoleh data yang komprehensif terkait kesehatan masyarakat di Kelurahan Nunu. Data "Blok Kesehatan" ini kemungkinan berisi informasi mengenai angka kesakitan, angka kematian, status gizi, cakupan imunisasi, dan indikator kesehatan lainnya. Data ini sangat relevan dengan kegiatan sosialisasi peningkatan realisasi anggaran karena dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan masyarakat yang dapat dipengaruhi oleh efektivitas pengelolaan anggaran di bidang kesehatan.

Dengan mendapatkan data "Blok Kesehatan", tim pelaksana dapat:

1. Menganalisis hubungan antara pengelolaan anggaran dengan kondisi kesehatan masyarakat. Data ini dapat digunakan untuk melihat apakah ada korelasi antara tingkat realisasi anggaran di bidang kesehatan dengan indikator kesehatan masyarakat.
2. Mengidentifikasi masalah kesehatan yang paling mendesak di Kelurahan Nunu. Dengan mengetahui masalah kesehatan yang paling banyak terjadi, tim pelaksana dapat memberikan rekomendasi kepada pihak kelurahan mengenai prioritas penggunaan anggaran di bidang kesehatan.
3. Mengevaluasi efektivitas program kesehatan yang telah dilaksanakan. Data "Blok Kesehatan" dapat digunakan untuk melihat apakah program kesehatan yang telah didanai oleh anggaran kelurahan memberikan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat.



Sumber: Hasil Survey Lapangan 2024

Gambar 9 Proses Penginputan Data Blok Kesehatan

Gambar 9 menunjukkan kegiatan penulis dan tim melakukan input data "Blok Kesehatan" yang telah diperoleh dari Puskesmas Sangurara pada minggu pertama bulan Mei. Setelah berhasil mendapatkan data "Blok Kesehatan" dari Puskesmas Sangurara, tim melanjutkan kegiatan dengan menginput data tersebut. Data "Blok Kesehatan" ini merupakan informasi penting terkait kesehatan masyarakat di Kelurahan Nunu, seperti angka kesakitan, angka kematian, status gizi, cakupan imunisasi, dan indikator kesehatan lainnya.

Kegiatan input data ini bertujuan untuk:

1. Mengorganisir dan menyusun data "Blok Kesehatan" agar mudah dianalisis. Data yang diperoleh dari Puskesmas Sangurara mungkin masih dalam bentuk mentah atau belum terstruktur. Dengan menginput data ke dalam format yang sesuai, tim pelaksana dapat lebih mudah melakukan analisis dan interpretasi data.
2. Mempersiapkan data untuk analisis lebih lanjut. Data yang telah terinput dapat digunakan

untuk menganalisis hubungan antara pengelolaan anggaran dengan kondisi kesehatan masyarakat, mengidentifikasi masalah kesehatan yang paling mendesak, serta mengevaluasi efektivitas program kesehatan yang telah dilaksanakan.

3. Mengintegrasikan data "Blok Kesehatan" dengan data lain yang telah dikumpulkan. Data "Blok Kesehatan" dapat digabungkan dengan data hasil pendataan ketua RT, sekolah-sekolah, dan masyarakat umum untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat di Kelurahan Nunu.

Dengan melakukan input data "Blok Kesehatan" secara cermat dan teliti, tim pelaksana dapat memastikan kualitas dan keakuratan data yang akan digunakan dalam analisis dan penyusunan rekomendasi.



Sumber: Hasil Survey Lapangan 2024

Gambar 10 Peninjauan Kembali Data RT di Kelurahan

Gambar 10 menunjukkan kegiatan penulis dan tim yang kembali turun ke lapangan pada minggu kedua bulan Mei untuk mendata ketua RT yang sebelumnya belum sempat didata pada bulan Maret. Kegiatan ini menunjukkan upaya tim pelaksana untuk melengkapi data yang belum tercakup pada pendataan sebelumnya. Data yang diperoleh dari ketua RT yang belum sempat di data sebelumnya akan melengkapi data yang telah ada dan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai tingkat pemahaman, partisipasi, dan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan anggaran kelurahan. Data ini akan menjadi masukan berharga dalam penyusunan strategi sosialisasi yang lebih tepat sasaran dan efektif



Sumber: Hasil Survey Lapangan 2024

Gambar 11 Meninjau Kembali Data yang Diperoleh

Gambar 11 menunjukkan kegiatan penulis dan tim pada minggu ketiga dan keempat bulan Mei, di mana mereka melengkapi dan memastikan semua data yang terkumpul sudah terisi ke dalam Kuesioner Besar. Tahap ini merupakan tahap penting dalam proses pengumpulan dan pengolahan data. Setelah semua data dari berbagai sumber, termasuk ketua RT, sekolah, puskesmas, dan masyarakat umum, terkumpul, tim melakukan input data ke dalam Kuesioner Besar. Kuisisioner Besar ini kemungkinan berisi pertanyaan-pertanyaan yang lebih komprehensif dan detail mengenai berbagai aspek kehidupan masyarakat di Kelurahan Nunu, termasuk pemahaman mereka tentang anggaran kelurahan, tingkat partisipasi dalam

pengelolaan anggaran, serta aspirasi dan kebutuhan mereka terkait penggunaan anggaran



Sumber: Hasil Survey Lapangan 2024

Gambar 12 Proses Pembuatan Booklet Kelurahan

Gambar 12 menunjukkan kegiatan penulis dan tim pada minggu pertama hingga minggu ketiga bulan Juni, di mana mereka membuat booklet atau buku profil Kelurahan Nunu. Pada minggu ketiga, penulis masih dalam proses pembuatan buku profil, dan pada minggu ketiga hingga keempat bulan Juni, penulis menyusun laporan akhir kegiatan Kelurahan Cinta Statistik. Tahap ini merupakan tahap akhir dari kegiatan sosialisasi peningkatan realisasi anggaran di Kelurahan Nunu. Pembuatan booklet atau buku profil Kelurahan Nunu bertujuan untuk merangkum seluruh informasi yang telah dikumpulkan selama kegiatan sosialisasi, termasuk data-data mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat, serta tingkat pemahaman dan partisipasi mereka dalam pengelolaan anggaran. Buku profil ini akan menjadi dokumen penting yang dapat digunakan oleh Kelurahan Nunu sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran di masa depan.



Sumber: Hasil Survey Lapangan 2024

Gambar 13 Proses Penyelesaian Pengabdian

Gambar 13 menunjukkan kegiatan perpisahan antara penulis dan tim dengan Ibu Lurah, Sekretaris Lurah, dan seluruh staf Kelurahan Nunu pada minggu terakhir bulan Juni, menandai berakhirnya kegiatan sosialisasi di Kelurahan Nunu. Kegiatan perpisahan ini merupakan penutup dari rangkaian kegiatan sosialisasi peningkatan realisasi anggaran di Kelurahan Nunu. Kegiatan ini menjadi momen penting untuk merefleksikan seluruh proses yang telah dilalui, mulai dari koordinasi awal, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan dan buku profil kelurahan.

Pembahasan

Peran Sosialisasi Pengelolaan Dana dalam Meningkatkan Realisasi Anggaran

Sosialisasi pengelolaan dana merupakan faktor kunci dalam meningkatkan realisasi anggaran, terutama di tingkat kelurahan. Sosialisasi berperan sebagai jembatan komunikasi

antara pemerintah dan masyarakat, memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memahami dengan baik proses pengelolaan dana publik. Dengan pemahaman yang komprehensif, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan penggunaan dana, sehingga anggaran dapat direalisasikan secara optimal dan tepat sasaran. Sosialisasi yang efektif tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kesadaran dan pemahaman yang mendalam di kalangan masyarakat. Melalui sosialisasi, masyarakat diberikan pemahaman komprehensif tentang mekanisme pengelolaan dana, alur anggaran, dan peraturan terkait. Mereka juga diedukasi tentang hak dan kewajiban mereka dalam proses penganggaran, sehingga dapat berperan aktif dalam mengawasi penggunaan dana publik.

Pemahaman yang baik akan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya penggunaan dana yang efektif, efisien, dan transparan. Masyarakat akan lebih peduli terhadap bagaimana dana publik dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Kesadaran ini akan mendorong mereka untuk turut serta dalam mengawasi penggunaan dana, memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk program dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan juga dapat meminimalisir potensi penyelewengan dan penyalahgunaan dana.

Tantangan dan Hambatan Dalam Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana kelurahan yang efektif merupakan pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput. Dana kelurahan, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ditujukan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan di kelurahan, mulai dari pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, hingga peningkatan pelayanan publik. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan dana kelurahan seringkali menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan dinamis. Tantangan-tantangan ini dapat menghambat optimalisasi penggunaan dana kelurahan dan berdampak pada pencapaian tujuan pembangunan di tingkat kelurahan.

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan dana kelurahan adalah kurangnya kapasitas aparatur kelurahan. Kapasitas aparatur, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun pengalaman, memegang peranan krusial dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana kelurahan. Keterbatasan kapasitas aparatur dapat berujung pada perencanaan program yang kurang tepat sasaran, pelaksanaan kegiatan yang tidak efisien, pengawasan yang lemah, dan pelaporan keuangan yang tidak akurat. Kondisi ini diperparah dengan tingginya tingkat pergantian aparatur di kelurahan akibat mutasi atau promosi jabatan, sehingga menimbulkan kesulitan dalam menjaga kontinuitas dan konsistensi pengelolaan dana kelurahan.

Tantangan berikutnya adalah kompleksitas regulasi dan birokrasi. Regulasi yang mengatur pengelolaan dana kelurahan cukup kompleks dan seringkali mengalami perubahan. Aparatur kelurahan dituntut untuk memahami dan menerapkan berbagai peraturan perundang-undangan, pedoman teknis, dan surat edaran yang berlaku. Selain itu, prosedur pencairan dan penggunaan dana kelurahan juga cukup rumit dan melibatkan berbagai instansi, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga pemerintah kota/kabupaten. Kompleksitas regulasi dan birokrasi ini dapat menyebabkan aparatur kelurahan kesulitan dalam mengelola dana kelurahan secara efektif dan efisien, serta berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi dan penyimpangan.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana kelurahan juga menjadi tantangan

tersendiri. Meskipun dana kelurahan ditujukan untuk kepentingan masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana kelurahan masih relatif rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya kurangnya informasi dan pemahaman masyarakat tentang dana kelurahan, kurangnya kesadaran akan hak dan kewajibannya dalam pengawasan dana kelurahan, serta kurangnya kepercayaan terhadap aparat kelurahan. Rendahnya partisipasi masyarakat dapat mengakibatkan program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta meningkatkan potensi terjadinya penyelewengan.

Keterbatasan infrastruktur juga menjadi kendala dalam pengelolaan dana kelurahan. Infrastruktur yang memadai, terutama dalam hal teknologi informasi dan komunikasi (TIK), sangat diperlukan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan. Namun, tidak semua kelurahan memiliki akses internet yang memadai dan sistem informasi pengelolaan keuangan yang terintegrasi. Keterbatasan infrastruktur ini dapat menghambat proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan penggunaan dana kelurahan.

Tantangan lainnya adalah kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar instansi. Pengelolaan dana kelurahan melibatkan berbagai instansi, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga pemerintah kota/kabupaten. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar instansi ini dapat menyebabkan tumpang tindih program dan kegiatan, inefisiensi penggunaan dana, serta kesulitan dalam pengawasan.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas aparat kelurahan melalui pelatihan dan pendampingan, penyederhanaan regulasi dan birokrasi, peningkatan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan pemberdayaan, penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, peningkatan infrastruktur, serta penguatan koordinasi dan sinkronisasi antar instansi merupakan beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana kelurahan.

Optimalisasi Strategi Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses berkelanjutan yang melibatkan pengajaran kepada masyarakat tentang adat istiadat, nilai-nilai, dan cara hidup komunitasnya untuk menjadi anggota komunitas itu sendiri (Rinny Agustin, 2014). Pengembangan modul sosialisasi yang lebih interaktif dan menarik, dengan menggunakan metode pembelajaran partisipatif seperti diskusi kelompok, simulasi, atau permainan peran, memungkinkan masyarakat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Keterlibatan aktif ini tidak hanya meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan anggaran, tetapi juga menggali nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai ini, yang memiliki beragam penafsiran dalam berbagai disiplin ilmu seperti ekonomi, ilmu sosial, akuntansi, dan pemasaran, menjadi landasan penting dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat. Modul sosialisasi yang interaktif juga dapat meningkatkan motivasi dan minat masyarakat untuk belajar. Penggunaan bahasa yang sederhana, visualisasi data yang menarik, serta contoh-contoh kasus yang relevan dapat membantu masyarakat memahami konsep-konsep abstrak yang terkait dengan anggaran dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Pemberdayaan yang dijalankan yaitu meliputi dari partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam memecahkan masalah yang berada di wilayahnya sendiri (Mulyawati, 2021). Selain itu, modul sosialisasi yang menarik dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Misalnya, modul dapat memuat informasi tentang hak dan kewajiban masyarakat

dalam pengelolaan anggaran, serta cara-cara untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, serta mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan kelurahan.

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran

Sosialisasi berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik. Melalui sosialisasi, pemerintah dapat menyampaikan informasi secara terbuka dan transparan kepada masyarakat mengenai seluruh proses pengelolaan dana, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan. Transparansi yang dibangun melalui sosialisasi akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi penggunaan dana publik secara langsung. Jika terdapat ketidaksesuaian atau indikasi penyelewengan, masyarakat dapat langsung mempertanyakan dan menuntut pertanggungjawaban dari pengelola dana. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik merupakan hal yang sangat krusial. Sosialisasi yang menekankan aspek akuntabilitas akan mendorong para pengelola dana untuk lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Mereka akan lebih berhati-hati dalam menggunakan dana publik dan memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pemerintah kelurahan perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Transparansi dan akuntabilitas memiliki keterkaitan satu sama lain. Transparansi menunjuk pada kebebasan memperoleh informasi. Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Sedangkan Akuntabilitas sendiri merupakan sebuah konsep yang memfokuskan pada kapasitas organisasi sektor publik untuk memberikan jawaban terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi tersebut (Wicaksono, 2015).

Informasi mengenai anggaran kelurahan harus mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah kelurahan juga perlu memberikan laporan pertanggungjawaban yang jelas dan transparan kepada masyarakat mengenai penggunaan anggaran. Selain Akuntabilitas untuk pelaksanaan Pemerintahan yang baik juga diperlukan adanya unsur transparansi (Sukmawati & Nurfitriani, 2019). Keadilan dalam pengelolaan anggaran menjadi sangat penting, terutama dalam konteks pengentasan kemiskinan. Transparansi anggaran yang baik memungkinkan masyarakat untuk mengawasi apakah alokasi dana benar-benar memprioritaskan program-program yang berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan, seperti bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi. Akuntabilitas yang kuat memastikan bahwa dana tersebut tidak disalahgunakan dan benar-benar mencapai tujuannya, sehingga upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan. Menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan sosialisasi peningkatan realisasi anggaran di Kantor Kelurahan Nunu dapat lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan publik di Kelurahan Nunu.

Dampak Positif Peningkatan Realisasi Anggaran

Peningkatan realisasi anggaran, baik di tingkat nasional maupun daerah, merupakan indikator penting keberhasilan pengelolaan keuangan negara. Realisasi anggaran yang optimal mencerminkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana publik untuk mencapai

tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Tingkat kelurahan, peningkatan realisasi anggaran dana kelurahan berdampak positif secara signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, mendorong kemajuan, dan meningkatkan kesejahteraan.

Salah satu dampak positif yang paling nyata adalah percepatan pembangunan infrastruktur. Dana kelurahan yang terserap dengan baik memungkinkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang menjadi fondasi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan jalan, jembatan, drainase, irigasi, dan fasilitas umum lainnya akan meningkatkan aksesibilitas, konektivitas, dan mobilitas penduduk, memudahkan akses terhadap pelayanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang memadai juga akan meningkatkan daya tarik kelurahan bagi investor dan wisatawan, sehingga berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Peningkatan realisasi anggaran juga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik yang berkualitas merupakan hak setiap warga negara dan menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan. Dengan dana kelurahan yang terealisasi dengan baik, kelurahan dapat meningkatkan kualitas pelayanan di berbagai bidang, seperti administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Misalnya, pembangunan posyandu, gedung sekolah, dan balai pertemuan akan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan. Peningkatan kualitas pelayanan publik akan meningkatkan kepuasan masyarakat dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bidang ekonomi, peningkatan realisasi anggaran mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dana kelurahan dapat dialokasikan untuk program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, pengembangan UMKM, dan bantuan modal usaha. Program-program tersebut akan meningkatkan kapasitas dan daya saing masyarakat dalam menghadapi persaingan ekonomi yang semakin ketat. Peningkatan kegiatan ekonomi produktif akan menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Peningkatan realisasi anggaran juga berkontribusi pada peningkatan kualitas lingkungan. Dana kelurahan dapat digunakan untuk mendanai program-program pengelolaan lingkungan, seperti penanaman pohon, pengolahan sampah, dan pembangunan ruang terbuka hijau. Program-program tersebut akan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lingkungan yang baik juga akan mendukung kegiatan ekonomi, seperti pariwisata dan pertanian. Selain itu, peningkatan realisasi anggaran juga berdampak pada peningkatan kapasitas aparatur kelurahan. Dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana kelurahan, aparatur kelurahan akan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang berharga dalam bidang pengelolaan keuangan publik. Hal ini akan meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas aparatur kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dampak positif lainnya adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Proses perencanaan dan pengawasan penggunaan dana kelurahan melibatkan partisipasi masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan forum-forum lainnya. Partisipasi masyarakat ini akan meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pembangunan di kelurahan, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis dan transparan. Secara keseluruhan, peningkatan realisasi anggaran dana kelurahan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang memadai, pelayanan publik yang berkualitas, perekonomian yang berkembang, lingkungan yang baik, dan tata kelola pemerintahan yang baik akan menciptakan kondisi yang kondusif

bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat kelurahan.

Namun, perlu diingat bahwa peningkatan realisasi anggaran bukanlah satu-satunya faktor penentu keberhasilan pembangunan. Faktor-faktor lain, seperti kualitas sumber daya manusia, kepemimpinan, dan partisipasi masyarakat, juga memiliki peran yang sangat penting. Oleh karena itu, peningkatan realisasi anggaran perlu diimbangi dengan upaya-upaya peningkatan di bidang-bidang lainnya agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

SIMPULAN

Sosialisasi pengelolaan dana memiliki peran yang sangat vital dalam meningkatkan realisasi anggaran. Melalui sosialisasi yang efektif, masyarakat dapat diberdayakan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengelolaan dana publik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Sosialisasi juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik, sehingga dana tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Dengan memaksimalkan peran sosialisasi, diharapkan realisasi anggaran dapat ditingkatkan dan memberikan dampak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Lurah dan seluruh jajaran Kelurahan Nunu, masyarakat Kelurahan Nunu, serta seluruh pihak yang terlibat. Dukungan dan partisipasi aktif Anda sangat berarti dalam keberhasilan program ini untuk peningkatan realisasi anggaran ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi Kelurahan Nunu.

DAFTAR PUSTAKA

- Daswati, Buntuang, P. C. D., Hattab, S., & Kornelius, Y. (2021). Effect of servant leadership on the performance of a regional general hospital. *Problems and Perspectives in Management*, 19(2), 507–518. [https://doi.org/10.21511/ppm.19\(2\).2021.40](https://doi.org/10.21511/ppm.19(2).2021.40)
- Ferdinand, A. T., & Wahyuningsih, W. (2018). Salespeople's innovativeness: A driver of sales performance. *Management and Marketing*, 13(2), 966–984. <https://doi.org/10.2478/mmcks-2018-0016>
- Fitriasari, E. (2021). Sosialisasi Penggunaan Masker Sebagai Upaya Penerapan Protokol Kesehatan Di Masyarakat Desa Kairatu. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 1(2), 8–10. <https://doi.org/10.31004/jh.v1i2.16>
- Mashuri, M., Suwarno, S., & Pramono, T. (2020). Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Perspektif Community Driven Development. *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 4(1), 51–62. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v4i1.819>
- Mulyawati, L. (2021). *Partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK): Studi deskriptif di Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Nurhayati, N., & Saleh Ridwan, M. (2019). Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 1, 68–80. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v1i1.10941>
- Rinny Agustin. (2014). Persepsi Masyarakat tentang Sosialisasi Bahaya Narkoba di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda. *EJournal Ilmu Komunikasi*, 2(3), 294–308. [https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/08/eJournal_Rinny_\(08-27-14-04-31-48\).pdf](https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/08/eJournal_Rinny_(08-27-14-04-31-48).pdf)
- Risnawati, R., Wirastuti, W., Natsir, S., Rosanty, N. P. E., Fadjar, A., Munawarah, M., & Fera, F.

- (2022). Adaptasi Dan Kolaborasi Menuju Koperasi Inovatif Kota Palu. *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 4(4), 698–707. <https://doi.org/10.36312/sasambo.v4i4.927>
- Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 374–388. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.374-388>
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM*, 2(1), 52–66.
- Suparman, Muzakir, Poigi, H. I., Basir, I., & Dewi, P. C. (2024). Sosialisasi Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Persiapan Tompotika Di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. *Journal of Human And Education*, 4(4), 213–224.
- Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(1), 17. <https://doi.org/10.22146/jkap.7523>